

ANALISIS PLANNING, ORGANIZING, ACTUATING, DAN CONTROLLING PADA PENGELOLAAN PROGRAM MUDIK GRATIS SULAWESI TENGGARA 2026

An Analysis of Planning, Organizing, Actuating, and Controlling in Managing the 2026 Southeast Sulawesi Free Homecoming Program

Maudhy Satyadharma^{1*}

Rina Sutriana²

Sylsiani Mursalim³

Patta Hindi Asiz⁴

¹Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Tenggara

²Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Tenggara

³Institut Mekongga

⁴Universitas
Muhammadiyah Kendari

*email:
maudhymaudhy@gmail.com

Abstrak

Program tiket mudik gratis merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya pada momentum hari besar keagamaan seperti Idul Fitri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan program tiket mudik gratis di Provinsi Sulawesi Tenggara melalui pendekatan fungsi manajemen Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC) yang diintegrasikan dengan perspektif collaborative governance dan good governance. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek perencanaan telah dilakukan secara sistematis, namun masih menghadapi kendala akurasi data. Pada aspek pengorganisasian, kolaborasi antar pemangku kepentingan telah terbentuk tetapi belum optimal. Pada aspek pelaksanaan, program berjalan efektif namun masih terdapat kendala teknis operasional. Pada aspek pengawasan, mekanisme evaluasi telah dilakukan tetapi belum berbasis indikator kinerja yang komprehensif. Integrasi *collaborative governance* dan prinsip *good governance* terbukti mampu meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini merekomendasikan penguatan digitalisasi, peningkatan sinergi lintas sektor, dan pengembangan sistem evaluasi berbasis kinerja.

Abstract

The free homecoming ticket program is a strategic policy implemented by the regional government to improve public welfare, particularly during religious holidays such as Eid al-Fitr. This study aims to analyze the management of the free homecoming ticket program in Southeast Sulawesi Province through the Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POAC) management function approach, integrated with collaborative governance and good governance perspectives. The research method used was qualitative with a descriptive-analytical approach. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The results indicate that the planning aspect has been carried out systematically, but still faces challenges in data accuracy. In terms of organization, collaboration between stakeholders has been established but is not yet optimal. In terms of implementation, the program is running effectively, but technical operational challenges remain. In terms of supervision, an evaluation mechanism has been implemented but is not yet based on comprehensive performance indicators. The integration of collaborative governance and good governance principles has been proven to increase program effectiveness. This study recommends strengthening digitalization, increasing cross-sector synergy, and developing a performance-based evaluation system.

Kata Kunci:

Collaborative Governance
Good Governance
Mudik Gratis
POAC
Transportasi Publik

Keywords:

Collaborative Governance
Free Homecoming
Good Governance
POAC
Public Transportation



PENDAHULUAN

Mudik merupakan fenomena sosial yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Aktivitas ini tidak hanya mencerminkan mobilitas penduduk dalam skala besar, tetapi juga memiliki makna sosial, budaya, dan emosional yang mendalam (Iriyanto, 2012). Tradisi mudik identik dengan perayaan Idul Fitri, yang menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk kembali ke kampung halaman dan mempererat hubungan kekeluargaan. Dalam hal ini, mudik tidak hanya dipandang sebagai perjalanan fisik, tetapi juga sebagai bagian dari identitas sosial masyarakat Indonesia (Septiany et al., 2026).

Setiap tahun, arus mudik menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik dari segi jumlah pemudik maupun cakupan wilayah perjalanan (Permata & Kusbandrijo, 2024). Lonjakan mobilitas ini secara langsung berdampak pada meningkatnya kebutuhan transportasi, baik darat, laut, maupun udara. Namun, tingginya mobilitas tersebut sering kali memunculkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan lalu lintas, kepadatan di terminal dan pelabuhan, keterbatasan armada, serta meningkatnya angka kecelakaan. Selain itu, tingginya permintaan arus mudik juga mendorong kenaikan biaya transportasi yang cukup signifikan, sehingga menjadi beban bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah (suaramuhammadiyah.id, 2026).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa fenomena mudik memiliki kompleksitas yang tinggi dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Tidak hanya berkaitan dengan aspek mobilitas, tetapi juga menyangkut keselamatan, kenyamanan, dan keadilan dalam akses terhadap layanan transportasi (Mahdar & Satyadharma, 2023; Putri et al., 2024). Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam mengelola fenomena ini melalui kebijakan yang tepat dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Handini et al., 2025; Hasina & Satyadharma, 2023).

Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Perhubungan menghadirkan inovasi kebijakan berupa *Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026* yang merupakan program yang telah berjalan sejak tahun 2025. Program ini merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau bagi masyarakat (Lan, 2026; Surya, 2026). Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat, menekan penggunaan kendaraan pribadi, serta meningkatkan keselamatan perjalanan selama periode mudik.

Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026 menjadi salah satu strategi penting dalam mengatasi permasalahan transportasi saat arus mudik. Dengan menyediakan layanan transportasi gratis yang terorganisir, pemerintah dapat mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur utama serta menekan risiko kecelakaan yang sering terjadi akibat penggunaan kendaraan pribadi secara berlebihan. Selain itu, program ini juga memberikan manfaat sosial yang besar, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi (Lopi, 2026). Namun demikian, implementasi program mudik gratis tidak terlepas dari berbagai tantangan. Koordinasi antar instansi yang terlibat, seperti Dinas Perhubungan, kepolisian, operator transportasi, serta pihak terkait lainnya, adalah salah satu tantangan tersendiri dalam memastikan kelancaran pelaksanaan program. Dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berubah juga menuntut adanya fleksibilitas dalam pengelolaan program. Di samping itu, permasalahan teknis seperti distribusi tiket

yang tidak merata, kurangnya transparansi dalam proses pendaftaran yang juga masih dikeluhkan oleh masyarakat dalam program tahun lalu, serta kendala operasional di lapangan juga sering menjadi hambatan dalam pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas manajemen yang diterapkan dalam pengelolaannya



Gambar 1 Flyer Kegiatan Mudik Gratis Bersama ASR 2026
 Sumber : Dishub Sultra (2026)

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan manajemen yang komprehensif untuk memastikan bahwa Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026 dapat berjalan secara efektif dan efisien. Salah satu pendekatan yang relevan adalah konsep POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) yang dikemukakan oleh George R. Terry. Konsep ini memberikan kerangka dasar dalam mengelola suatu program secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi (Syahputra & Aslami, 2023).

Selain pendekatan POAC, keberhasilan Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026 juga sangat dipengaruhi oleh penerapan konsep *collaborative governance*. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan (Cahyono, 2026; Latullah et al., 2025). Dalam program mudik gratis, *collaborative governance* tercermin dalam keterlibatan pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat sebagai pengguna layanan (Nuhun et al., 2024; Syaiful, Laode, Sutriana, et al., 2025; Wulandjani et al., 2025).

Di sisi lain, penerapan prinsip *good governance* juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan program (Putra et al., 2025; Suwanda & Tjenreng, 2025). Prinsip-prinsip seperti

transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi harus menjadi landasan dalam setiap tahapan pelaksanaan program (Birdayanthi et al., 2025; Kikasu & Dorasamy, 2025). Transparansi dapat diwujudkan melalui sistem pendaftaran yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, sementara akuntabilitas tercermin dalam pelaporan penggunaan anggaran serta hasil pelaksanaan program. Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam *good governance*. Melalui partisipasi, masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan aktif dalam memberikan masukan dan evaluasi terhadap program yang dijalankan (Nuryana et al., 2025; Rijal, 2023). Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026 juga dapat dipandang sebagai inovasi pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Nugraha & Manggalou, 2024). Program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung berupa pengurangan biaya transportasi, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan (tempo.co, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026 merupakan suatu proses yang kompleks dan multidimensional. Keberhasilan program sangat ditentukan oleh integrasi antara fungsi manajemen, kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026 di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan fungsi *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling* (POAC). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji peran *collaborative governance* dan dalam meningkatkan efektivitas serta kualitas pelayanan program mudik gratis.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian difokuskan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menjadi leading sector dalam penyelenggaraan Mudik Gratis Bersama ASR Tahun 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap fokus yang diangkat. Adapun informan penelitian akan diuraikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama Informan Penelitian	Jabatan
1	Dr. Muhamad Rajulan, ST.,M.Si	Kepala Dishub Sultra
2	Ferima, S.Si.,MM	Plh. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Torobulu-Tampo
3	Ringo Taufan Laode, S.Ip.,M.Sc	Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang Dishub Sultra
4	Firmansyah, S.Sos	Kepala Seksi Operasional Wilayah Daratan II UPTD Sarprashub LLAJ Wil. Daratan Dishub Sultra

Sumber : Data Primer (2026)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026 di Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengimplementasikan fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) secara cukup sistematis, meskipun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Secara umum, keempat fungsi manajemen tersebut saling berkaitan dan menjadi dasar dalam menilai keberhasilan pengelolaan program dalam konteks pelayanan publik transportasi.



Gambar 2 Rapat awal sebagai tahapan perencanaan Program Mudik Gratis Bersama ASR Tahun 2026
Sumber : Dishub Sultra (2026)

Pada tahap *planning*, pemerintah telah melakukan perencanaan melalui identifikasi kebutuhan masyarakat, penentuan rute prioritas, serta penyediaan armada transportasi yang disesuaikan dengan kapasitas anggaran. Perencanaan ini menunjukkan adanya upaya untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara lebih terarah dan responsif. Selain itu, tidak diterapkannya sistem pendaftaran berbasis digital menjadi tantangan dalam pelaksanaan program terkait transparansi dan efisiensi. Hal ini menunjukkan bahwa kedepannya program ini membutuhkan perencanaan berbasis data yang lebih komprehensif masih perlu diperkuat agar program dapat lebih tepat sasaran.

Pada tahap *organizing* (pengorganisasian), pengorganisasian program melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai *leading sector*, kepolisian, operator transportasi, serta instansi pendukung lainnya. Kolaborasi ini mencerminkan penerapan konsep *collaborative governance*, di mana sinergi antar pihak menjadi kunci dalam pelaksanaan program. Pembagian tugas dan tanggung jawab telah dilakukan secara struktural, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala komunikasi dan koordinasi di lapangan, terutama pada saat puncak arus mudik. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor yang lebih adaptif dan berbasis sistem.

Selanjutnya, pada tahap *actuating* (pelaksanaan), pelaksanaan program menunjukkan hasil yang cukup positif, ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat serta terselenggaranya proses keberangkatan sesuai jadwal.



Gambar 3 Suasana Arus Mudik 1447 H (2026 M) di Terminal Baruga, Kendari
Sumber : Dishub Sultra (2026)

Program mudik gratis ini terbukti mampu mengurangi beban biaya transportasi masyarakat Sulawesi Tenggara serta menekan penggunaan kendaraan pribadi, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan kepadatan lalu lintas dan kemacetan mudik secara keseluruhan. Namun, beberapa kendala teknis masih ditemukan, seperti kualitas pelayanan di beberapa titik keberangkatan yang belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aspek pelayanan publik masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan di lapangan.

Pada tahap *controlling* (pengawasan), pengawasan dan evaluasi telah dilakukan melalui monitoring pelaksanaan dan pengumpulan umpan balik dari masyarakat. Namun, sistem pengendalian yang ada masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem berbasis teknologi informasi. Evaluasi yang dilakukan cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya berbasis indikator kinerja yang terukur. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan guna mendukung perbaikan program secara sistematis. Evaluasi juga penting untuk dilaksanakan dalam memastikan pelaksanaan program ini akan berjalan lebih baik lagi di masa yang akan datang (Djiddin et al., 2025; Syaiful, Laode, Satyadharma, et al., 2025).



Gambar 4 Suasana Program Mudik Gratis Tahun 2026 di Pelabuhan Baubau
Sumber : Dishub Sultra (2026)

Jika ditinjau dari perspektif teori manajemen yang dikemukakan oleh George R. Terry, keberhasilan suatu program sangat ditentukan oleh keterpaduan antara fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling* (Hasnida & Azhari, 2024; Syahputra & Aslami, 2023). Dalam sudut pandang dari Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026, keempat fungsi tersebut telah diterapkan, namun belum sepenuhnya optimal dalam mendukung efektivitas program secara menyeluruh, terutama pada aspek integrasi antar fungsi.

Selain itu, penerapan *collaborative governance* terlihat dari keterlibatan berbagai pihak dalam pelaksanaan program, yang menunjukkan adanya upaya kolaboratif dalam mengatasi keterbatasan sumber daya (Hado et al., 2024). Selain itu pelibatan media sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program ini dikarenakan mampu menjadi jembatan informasi kegiatan kepada masyarakat (Mursalim et al., 2025; Satyadharma et al., 2023). Di sisi lain, prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi mulai diterapkan, namun masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek keterbukaan informasi, akuntabilitas pelaporan, serta partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi (Ladanu et al., 2025). Penguatan ini dapat dilakukan melalui penyediaan kanal informasi publik yang mudah diakses, pelaporan yang terstruktur dan tepat waktu, serta pelibatan aktif masyarakat melalui survei kepuasan dan forum umpan balik.



Gambar 5 Meme Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026 telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek perencanaan berbasis data, koordinasi lintas sektor, kualitas pelayanan, serta sistem pengawasan yang terintegrasi (Nasrul et al., 2026). Penguatan pada aspek-aspek tersebut akan sangat menentukan keberlanjutan program serta peningkatan kualitas pelayanan publik transportasi di masa mendatang (Ikhsan et al., 2025).

Dengan demikian, pengelolaan Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026 tidak hanya menunjukkan kinerja yang cukup baik, tetapi juga mencerminkan semangat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik sektor transportasi yang inklusif dan berkeadilan (Rajulan et al., 2025). Upaya perbaikan pada aspek perencanaan berbasis data, koordinasi lintas sektor, kualitas pelayanan, serta sistem pengawasan terintegrasi menjadi langkah strategis

dalam mendukung keberlanjutan program. Hal ini sejalan dengan tagline “Mudik 2026, Mudik Aman Keluarga Bahagia”, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan perjalanan yang aman, nyaman, serta memberikan kebahagiaan bagi masyarakat secara luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Program Mudik Gratis Bersama ASR 2026 di Provinsi Sulawesi Tenggara telah menerapkan fungsi manajemen POAC secara cukup efektif, meskipun belum optimal pada seluruh aspek. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian telah berjalan secara sistematis, namun masih memerlukan penguatan pada integrasi data, koordinasi lintas sektor, serta sistem evaluasi berbasis teknologi. Penerapan *collaborative governance* dan prinsip good governance juga telah mendukung keberhasilan program, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, program ini memberikan dampak positif dalam mengurangi beban ekonomi, meningkatkan keselamatan perjalanan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara perlu memperkuat sistem manajemen berbasis digital dan koordinasi lintas sektor. Pengembangan platform pendaftaran terpadu yang terintegrasi dengan data kependudukan menjadi penting untuk memastikan ketepatan sasaran dan transparansi distribusi tiket. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta optimalisasi peran pengawasan berbasis teknologi informasi agar proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara real-time dan akuntabel. Bagi masyarakat pemudik, diharapkan dapat memanfaatkan program ini secara bijak dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendaftaran, kepatuhan terhadap jadwal keberangkatan, serta menjaga ketertiban selama perjalanan menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran program. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada penyelenggara sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan layanan di masa mendatang. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif maupun *mixed methods* guna mengukur secara lebih komprehensif tingkat efektivitas program, termasuk dampaknya terhadap pengurangan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Penelitian juga dapat mengembangkan model evaluasi berbasis indikator kinerja yang lebih terukur serta mengkaji integrasi teknologi digital dalam pengelolaan transportasi publik.

REFERENSI

- Birdayanthi, B., Yusriadi, Y., & Ikmal, I. (2025). Accountability and Transparency in Public Administration for Improved Service Delivery. *Journal Social Civilecial*, 3(1), 34–47. <https://doi.org/10.71435/610633>
- Cahyono, Y. (2026). Koordinasi Antar Lembaga Dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif. *Journal of Law, Policy, and Governance*, 1(1), 14–19. <https://ejournal.ayasophia.org/index.php/jlpg/article/view/213>
- Djiddin, M. A., Satyadharma, M., & Hasina, H. (2025). Evaluasi Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Pengembangan Sains Dan Teknologi*, 1(2),

- 125–134. <https://doi.org/10.63866/jpst.v1i2.96>
- Hado, Ilham, V. A., Aldinoman, & Satyadharma, M. (2024). Mekanisme Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pelabuhan Nambo Kabupaten Buton (Tinjauan Deskriptif). *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1401–1409. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i3.683>
- Handini, N., Mely Darwina, Yudistira, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 2(5), 964–986. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793>
- Hasina, H., & Satyadharma, M. (2023). Pengelolaan Angkutan Lebaran Tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tenggara. *CERMIN: JURNAL PENELITIAN*, 7(1), 48–57. https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i1.2798
- Hasnida, H., & Azhari, H. (2024). Fungsi Manajemen George Robert Terry Dalam Pandangan Islam. *Alashriyyah*, 10(2), 191–202. <https://doi.org/10.53038/alashriyyah.v10i2.207>
- Ikhsan, Z., Laode, R. T., Satyadharma, M., & Susanti, N. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Mendorong Optimalisasi Layanan Publik (Tinjauan Literatur). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 28–35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17157664>
- Iriyanto, A. M. (2012). Mudik dan Keretakan Budaya. *Humanika*, 15(9). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/humanika.15.9>
- Kikasu, E. T., & Dorasamy, N. (2025). Promoting Accountability and Transparency to Ensure Effective Governance. In *Development in Post-Apartheid South Africa* (pp. 103–130). Routledge.
- Ladanu, S. H., Pamungkas, D. B. P., & Satyadharma, M. (2025). Etika Profesi Insinyur sebagai Pilar Good Governance dalam Pelayanan Publik. *Cangkal: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 102–110. <https://batuahjurnal.my.id/index.php/cjish/article/view/91>
- Lan. (2026). Mudik Gratis ASR 2026 Dibuka, 2.622 Warga Sultra Difasilitasi Pulang Kampung. *Tajuk Sultra*. <https://tajuksultra.id/mudik-gratis-asr-2026-dibuka-2-622-warga-sultra-difasilitasi-pulang-kampung/>
- Latullah, R. H., Sulisty, G. A., Satyadharma, M., & Hado, H. (2025). Collaborative Governance dalam Pengawasan Angkutan Barang Umum yang Berkontribusi terhadap Program Zero Over Dimension dan Over Loading. *Journal of Engineering and Applied Technology*, 1(2), 30–37. <https://doi.org/10.65310/ty3esh07>
- Lopi, E. P. (2026). Mudik Gratis ASR 2026 Disambut Antusias, 2.622 Warga Sultra Pulang Kampung Dengan Aman. *Terkini Kendari*. <https://kendari.terkini.id/2026/03/13/mudik-gratis-asr-2026-disambut-antusias-2-622-warga-sultra-pulang-kampung-dengan-aman>
- Mahdar, M., & Satyadharma, M. (2023). Efektivitas Komunikasi Interpersonal dalam Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2023 pada Pelabuhan Penyeberangan Baubau dan Pelabuhan Penyeberangan Waara. *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA*, 15(02), 100. <https://doi.org/10.33221/jikom1.v15i02.286>
- Mursalim, S., Sulisty, G. A., & Satyadharma, M. (2025). Media Framing of Freight Transportation Policy

- During the Christmas 2025 and New Year 2026 Period. *Islamic Business and Management Journal*, 8(2), 378–385. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/IBMJ/article/view/15752>
- Nasrul, Satyadharma, M., Hado, Sulisty, G. A., & Mursalim, S. (2026). Peran Insinyur Dalam Pengembangan Infrastruktur Transportasi Berbasis Prinsip Keberlanjutan: Kajian Literatur. *Rangas: Jurnal Teknik Dan Ilmu Terapan*, 1(1), 58–67. <https://batuahjurnal.my.id/index.php/rjtit/article/view/129>
- Nugraha, H. A., & Manggalou, S. (2024). Program Pelayanan Bantuan Mudik Bareng Gratis Puspa Agro. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pelita Nusantara*, 2(2), 56–61. <https://doi.org/10.69688/jpmp.v2i2.188>
- Nuhun, R., Soeparyanto, T. S., Nurrahmad Arsyad, L. O. M., Fidmasari, R., & Satyadharma, M. (2024). Peran Pemerintah dalam Penataan dan Penyelenggaraan Transportasi di Terminal Tipe B Baruga Kendari. *Bearing: Jurnal Penelitian Dan Kajian Teknik Sipil*, 9(2), 111. <https://doi.org/10.32502/jbearing.v9i2.8423>
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). Efektivitas Sosialisasi Sebagai Pendekatan Partisipatif Dalam Program Sosial: Tinjauan Sistematis Literatur. *Share: Social Work Journal*, 15(1), 35–47. <https://doi.org/10.24198/share.v15i1.63487>
- Permata, R. I., & Kusbandrijo, B. (2024). Pengawasan Arus Mudik 2024 di Pelabuhan Tanjung Perak Oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur. *Prosiding Simposium Nasional Administrasi Publik (SIAP)*, 2(01), 88–94. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/puis/article/view/3914>
- Putra, J. A., Permata, D., Djani, A. I., Sabetu, D. L., Finit, Y. N., & Mas'ud, F. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia: Tantangan dan Peluang Dalam Mengatasi Kesewenang-wenangan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(02), 1239–1251. <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/jimu/article/view/754>
- Putri, V. E. A., Iskandar, D. S., & Salsabila, A. P. (2024). Analisis Teks dan Konteks Pada Kolom Opini Kompas Mewaspadai Ledakan Mudik 2024. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 11(2). <https://jurnal.stkipgriponorogo.ac.id/index.php/JBS/article/view/408>
- Rajulan, M., Sulisty, G. A., Syaiful, & Satyadharma, M. (2025). Semangat Pahlawan Sebagai Teladan dalam Membangun Transportasi Berkeadilan. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 3(04), 1326–1334. <https://doi.org/10.70294/jimu.v3i04.1536>
- Rijal, S. (2023). The Importance of Community Involvement in Public Management Planning and Decision-Making Processes. *Journal of Contemporary Administration and Management (ADMAN)*, 1(2), 84–92. <https://doi.org/10.61100/adman.v1i2.27>
- Satyadharma, M., Elwan, L. O., & Putra, Z. (2023). Pemanfaatan Media Sosial Facebook dalam Penyebaran Informasi Transportasi ke Publik. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 07(02), 347–358. <https://doi.org/10.22437/titian.v7i2.29580>
- Septiany, D. A., Ayuningtiyas, K., Ghaisani, I. F., & Lestari, M. (2026). Nilai-Nilai Tradisi Mudik Saat Lebaran. *Journal of Multidisciplinary Learning*, 1(1), 16–20.

- <https://journal.aapbk.org/index.php/jml/article/view/501>
- suaramuhammadiyah.id. (2026). Ketika Ongkos Pulang Kian Berat, Mudik di Tengah Tekanan Ekonomi. *Suara Muhammadiyah*. <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/ketika-ongkos-pulang-kian-berat-mudik-di-tengah-tekanan-ekonomi>
- Surya, N. E. (2026). Ini Rute Program Mudik Gratis ASR 2026 Dibuka. *Radio Republik Indonesia*. <https://rri.co.id/kendari/arus-mudikbalik/2271693/ini-rute-program-mudik-gratis-asr-2026-dibuka>
- Suwanda, I. G. M., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah. *Jurnal PKM Manajemen Bisnis*, 5(1), 271–282. <https://doi.org/10.37481/pkmb.v5i1.1298>
- Syahputra, R. D., & Aslami, N. (2023). Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry. *Manajemen Kreatif Jurnal*, 1(3), 51–61. <https://doi.org/10.55606/makreju.v1i3.1615>
- Syaiful, Laode, R. T., Sutriana, R., Satyadharma, M., Susanti, N., & Jabbar, M. Y. (2025). Penguatan Tata Kelola Transportasi Melalui Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Kebijakan Tarif Angkutan Darat Kelas Ekonomi. *Rakat: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 47–55. <https://batuajurnal.my.id/index.php/rjpkpm/article/view/88>
- Syaiful, S., Laode, R. T., Satyadharma, M., Hado, H., Mahdar, M., & Sulisty, G. A. (2025). Evaluasi Efektivitas Sosialisasi dan Penegakan Hukum dalam Meningkatkan Kepatuhan Angkutan Penumpang dan Barang di Provinsi Sulawesi Tenggara. *IRA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (IRAJPKM)*, 3(3), 54–64. <https://doi.org/10.56862/irajpkm.v3i3.367>
- tempo.co. (2026). Mudik Gratis dan Dampak Ekonomi Yang Mengalir Ke Daerah. *Tempo*. <https://www.tempo.co/info-tempo/mudik-gratis-dan-dampak-ekonomi-yang-mengalir-ke-daerah-2123180>
- Wulandjani, H., Widiyehseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.